

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada suatu panti rehabilitasi sosial di wilayah Bekasi, terdapat puluhan orang dengan gangguan jiwa (disingkat sebagai ODGJ) yang duduk atau terbaring dengan lemas di dalam suatu paviliun tertutup oleh jeruji besi. Beberapa dari mereka bertelanjang dada dan kakinya dipasung menggunakan rantai selama bertahun-tahun sehingga tidak dapat bergerak. Seperti itulah kondisi panti rehabilitasi sosial yang diliput oleh seorang fotojurnalis bernama Reese dalam proyeknya yang berjudul *Disorder* (Reese, n.d.). Dalam proyek karyanya tersebut, Reese (n.d.) berhasil menyingkap puluhan praktik buruk, terutama pemasangan dan isolasi secara paksa, yang dilakukan oleh pihak fasilitas kesehatan jiwa terhadap kaum ODGJ di Indonesia. Karyanya ini dipakai oleh Human Rights Watch (disingkat HRW) dalam artikelnya yang mengungkap mengenai berbagai tindakan diskriminasi yang mengandung kekerasan dan pengabaian oleh para pihak panti rehabilitasi sosial terhadap ODGJ (HRW 2016a; 2016b). Diketahui bahwa pasung adalah salah satu tindakan diskriminasi yang paling kerap dilakukan dalam perawatan ODGJ (Mestdagh dalam Purnama, Yani, & Sutini, 2016). Di Indonesia, tercatat bahwa kira-kira terdapat 57.000 pasien gangguan jiwa yang pernah dipasung selama perawatan, dan 18.000 di antaranya masih di pasung sampai saat ini (Human Rights Watch 2016a; 2016b). Hal ini membuat

pemerintah menyelenggarakan Program Indonesia Bebas Pasung yang dimulai pada tahun 2014 (Manafe, 2014).

Dalam Undang Undang Kesehatan Jiwa (disingkat sebagai UU Kesehatan Jiwa) pasal 1 nomor 18 tahun 2014, ODGJ didefinisikan sebagai individu yang memiliki gangguan dalam aspek perilaku, pikiran, dan/atau perasaan sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Contohnya adalah individu dengan gangguan skizofrenia. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2014, diketahui bahwa jumlah ODGJ di Indonesia mencapai 400.000 orang (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2016). Untuk mengatasi hal ini, pihak pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas di dalam dan luar sektor kesehatan untuk mengupayakan kesehatan jiwa seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014 (disingkat UU Kesehatan Jiwa 2014). Contohnya adalah seperti rumah sakit jiwa, klinik psikolog, dll. Panti rehabilitasi sosial merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan jiwa di luar sektor kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan fungsi ODGJ dalam bermasyarakat. Namun dijelaskan bahwa ODGJ yang dirawat dalam fasilitas tersebut seharusnya bebas dari pemasungan seperti dalam kasus-kasus yang diliput oleh Reese (n.d.) dan/atau tindakan kekerasan lainnya.

Dari kasus-kasus yang berada dalam proyek *Disorder* karya Reese (n.d.), kita dapat melihat bahwa terdapat sejumlah panti rehabilitasi sosial di Indonesia yang melanggar hak asasi para ODGJ dengan memasung mereka. Namun, pada tahun 2016, seorang jurnalis majalah BBC bernama Washarti melakukan

kunjungan ke salah satu panti rehabilitasi sosial yang menampung para orang dengan gangguan jiwa (disingkat sebagai ODGJ) di wilayah Bekasi. Saat memasuki panti yang dikunjunginya, ia menemukan bahwa ada seorang pria yang sedang menyuapi para penghuni panti secara bergiliran walaupun ada beberapa dari mereka yang dipasung. Walaupun beberapa penghuni terlihat enggan untuk makan, pria tersebut dengan sabarnya memasukkan sendok ke mulut mereka. Pria tersebut ternyata adalah salah satu seorang pengurus di panti rehabilitasi sosial tersebut. Sejak tahun 2015, ia melayani para ODGJ dengan memberi mereka makan, memandikan mereka, serta menunjukkan mereka kasih sayang pada saat berinteraksi dengan mereka. Ia mengatakan bahwa tugasnya sehari-hari adalah sebuah “ibadah” sehingga ia tidak masalah dengan menerima upah yang sedikit dalam pelayanannya.

Dari kasus di atas, ternyata ditemukan bahwa ada pengurus panti yang memperlakukan ODGJ dengan penuh kasih sayang. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, peneliti mengadakan kunjungan ke salah satu panti rehabilitasi sosial yang para pengurusnya, sepengetahuan peneliti, tidak pernah dilaporkan melakukan tindakan diskriminasi atau kekerasan terhadap para penghuninya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan dua orang pengurus panti rehabilitasi sosial, keduanya menjelaskan bahwa mereka memutuskan untuk melayani ODGJ oleh karena belas kasihan (komunikasi personal, 21 Maret, 2017). Menurut penjelasan lebih lanjut dari salah satu narasumber yang telah bertugas selama sepuluh tahun, perasaan

tersebut muncul dari pemahamannya bahwa ODGJ adalah kaum yang patut dikasihani oleh karena kondisi mereka disebabkan oleh luka batin.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ODGJ dipandang oleh mereka sebagai individu yang berstatus sosial rendah oleh karena kelemahan yang ia miliki. Menurut teori dalam ranah ilmu psikologi sosial, pandangan tersebut mengindikasikan adanya *public stigma* gangguan jiwa. Menurut Goffman (1963), stigma adalah tanda atau label berupa atribut yang terlekat pada seorang individu akibat karakteristik yang ia miliki. Atribut tersebut membuatnya dikategorisasikan sebagai anggota dari kelompok berstatus sosial rendah. Salah satu jenis stigma adalah *public stigma* yang didefinisikan sebagai tanda atau label berupa individu yang dilekatkan oleh seorang individu terhadap suatu kelompok atau individu yang memiliki karakteristik tertentu (Goffman, 1963). Sedangkan, *public stigma* gangguan jiwa mengacu pada *public stigma* yang dilekatkan oleh seorang individu terhadap ODGJ (Pryor & Reeder dalam Bos, Pryor, Reeder, & Stutterheim, 2013; Pattyn, Verhaighe, Sercu, & Bracke, 2014).

Diketahui bahwa *public stigma* dapat menimbulkan dampak yang negatif dan/atau positif terhadap ODGJ. Dampak tersebut berasal dari sikap yang dimiliki seseorang sebagai respon dari atribut yang terlekat dalam diri ODGJ (Goffman, 1963). Sikap tersebut direfleksikan dari empat dimensi terpisah yang membentuk *public stigma* gangguan jiwa. Dua dimensi yang merefleksikan sikap positif adalah *benevolence* dan *community mental health ideology* (atau CMHI), sedangkan yang merefleksikan sikap negatif adalah *authoritarianism* dan *social restrictiveness* (atau SR).

Sebagai contoh, para narasumber yang diwawancarai oleh peneliti memiliki *public stigma* yang menghasilkan sikap positif terhadap ODGJ oleh karena label bahwa mereka adalah kaum yang patut menerima belas kasihan, sehingga mereka menunjukkan sikap *benevolence* terhadap para penghuni panti. Hal ini mungkin berbeda dengan para pengurus panti pada kasus-kasus yang diliput oleh Reese (n.d.) yang bersikap *authoritarian* sehingga mereka memasung para penghuni panti.

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia memiliki *public stigma* yang bersifat merugikan bagi para ODGJ (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014; Lestari & Wardhani, 2014; Purnama et al., 2016; Reese, 2013). Dalam beberapa penelitian mancanegara, ditemukan juga hal yang sama bahkan dalam populasi tenaga praktisi yang bertugas untuk melayani para ODGJ, termasuk pengurus panti rehabilitasi sosial (Benov et al., 2013; Ebrahimi, Namdar, & Vahidi, 2012; Feldman & Crandall, 2007; Pescosolido, Martin, Lang, & Olafsdottir, 2008). Hal ini membangkitkan keinginan peneliti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan *public stigma* gangguan jiwa.

Martin, Pescosolido, Olafsdottir, dan McLeod (2011) mengungkapkan bahwa agama adalah salah satu faktor sosiodemografis individual yang berperan dalam proses pembentukan tersebut. Di Indonesia, agama memainkan peran penting dalam kehidupan para penduduknya. Dalam hasil survei global yang diadakan Pew Research Center (2015), 95% masyarakat Indonesia berpendapat bahwa agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Hal ini

juga tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila pertama dari Pancasila. Dari penggalan tersebut, kita dapat lihat bahwa agama selayaknya memiliki peran yang sentral dalam sistem nilai masyarakat Indonesia

Allport dan Ross (1967) menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam beragama memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana ia bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mereka pun mengembangkan teori yang disebutnya sebagai orientasi religiusitas, yaitu merupakan jenis motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang terhadap agama yang dianutnya (Allport & Ross, 1967). Menurut mereka, individu dapat digerakkan oleh motivasi internal maupun eksternal dalam beragama. Individu yang secara kuat didorong oleh motivasi internal, atau disebut sebagai “*master motive*”, dalam beragama dikatakan sebagai individu yang memiliki orientasi religiusitas intrinsik yang tinggi. Mereka dideskripsikan oleh Allport dan Ross (1967) sebagai individu yang menghidupi ajaran-ajaran agamanya karena mereka sepenuhnya menginternalisasi ajaran agama yang dipercayainya. Sedangkan, individu yang secara kuat didorong oleh motivasi bersifat eksternal memiliki orientasi religiusitas ekstrinsik yang tinggi. Allport dan Ross (1967) mendeskripsikan mereka sebagai individu yang tidak sepenuhnya menghidupi agama yang dianutnya karena mereka cenderung memakai agama sebagai instrumen yang mendatangkan manfaat pribadi bagi mereka, seperti memperluas lingkungan sosial yang ia miliki dengan pergi ke gereja.

Menurut beberapa penelitian, ditemukan bahwa individu dengan orientasi religiusitas ekstrinsik yang tinggi ditemukan lebih memiliki *prejudice* (atau prasangka) terhadap kelompok minoritas atau yang memiliki perbedaan dengan diri mereka dibandingkan individu berorientasi intrinsik tinggi (Allport & Ross, 1967; Mandra, 2007). Ini dikarenakan individu berorientasi ekstrinsik tinggi tidak sepenuhnya menginternalisasi ajaran dari agama yang dipercayai mereka yang mengajarkan mengenai belas kasihan terhadap kaum tersebut. Selain itu, Allport & Ross (1967) pun menjelaskan bahwa individu berorientasi ekstrinsik tinggi dapat menggunakan *prejudice* selayaknya ia menggunakan agama untuk mendapatkan hal-hal yang ia inginkan (contohnya, seperti kenyamanan dan juga penerimaan dari lingkungan sosial).

Diketahui bahwa *prejudice* merupakan komponen yang termasuk dalam tahap kedua proses pembentukan *public stigma* gangguan jiwa. Diketahui bahwa tahap-tahap dalam proses pembentukan *public stigma* secara berurutan adalah pembentukan *ignorance* (yaitu kepercayaan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh target stigma yang kemudian membentuk stereotip mengenainya), *prejudice* (yaitu sikap terhadap target stigma yang ditentukan dari stereotip mengenai mereka) dan kemudian *discrimination* (yaitu tindakan yang berasal dari sikap terhadap target stigma; Corrigan dalam Angermeyer & Matschinger, 2003; Ebrahimi et al., 2012; Overton & Medina, 2008; Thornicroft, Rose, Kassam, & Sartorius, 2007). Maka, secara teori dapat disimpulkan bahwa orientasi religiusitas memiliki hubungan dengan *public stigma*. Berdasarkan pencarian peneliti, belum ada penelitian domestik maupun mancanegara yang membahas

mengenai hubungan antara *public stigma* gangguan jiwa dan orientasi religiositas. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk meneliti topik ini, terutama pada area panti rehabilitasi sosial di Indonesia.

Pemilihan populasi ini didasari oleh pertimbangan mengenai adanya sejumlah fenomena menarik yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti adalah fakta bahwa seluruh panti rehabilitasi sosial, baik milik dinas pemerintah maupun swasta, diwajibkan oleh UU Kesehatan Jiwa 2014 untuk menyediakan bimbingan mental dan spiritual kepada para ODGJ yang dirawat. Kebijakan ini mengimplikasikan bahwa para pengurus panti perlu melibatkan agama dalam pelayanan yang mereka berikan terhadap ODGJ. Bahkan ada beberapa panti yang dimiliki oleh yayasan berbasis agama tertentu yang menugaskan para pengurusnya untuk juga mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada para ODGJ yang dirawat.

Panti yang dikunjungi oleh peneliti adalah salah satu dari panti berbasis Agama Kristen di wilayah Jabotabek. Para pengurus panti yang menjadi narasumber dalam wawancara yang peneliti lakukan memiliki latar belakang pendidikan teologi dan juga *pastoral counseling* (komunikasi personal, 21 Maret, 2017). Mereka bertugas untuk memimpin ibadah harian untuk diikuti oleh para ODGJ yang dirawat dan juga membimbing mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Ini didasari oleh filosofi bahwa kondisi para ODGJ dapat membaik apabila mereka dekat dengan sosok Tuhan yang mampu menyembuhkan luka batin mereka.

Walaupun panti rehabilitasi sosial di Indonesia mengikutsertakan agama dalam pelayanannya, namun masih terdapat banyak kasus diskriminasi ODGJ yang terjadi dalam lingkungan tersebut seperti yang peneliti ulas sebelumnya (HRW 2016a; 2016b). Reese (n.d.) pun menemukan bahwa terdapat kasus kekerasan dalam salah satu panti rehabilitasi sosial berbasis agama yang ia kunjungi. Maka dapat dilihat seolah-olah agama, walaupun adalah aspek yang sentral dalam membentuk kehidupan masyarakat Indonesia (Pew Research Center, 2015) tidak sepenuhnya menjamin para pengikutnya untuk dapat sepenuhnya menghidupi nilai serta ajaran yang ditanamkan. Namun, beberapa dari pengurus panti rehabilitasi sosial di Indonesia (yaitu contohnya adalah para narasumber yang peneliti wawancarai) dapat memperlakukan ODGJ dengan cinta kasih selayaknya manusia seperti yang diajarkan oleh agama mereka.

Melihat adanya kesenjangan dalam fenomena-fenomena terkait praktik panti rehabilitasi sosial seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa penting untuk melihat aspek *public stigma* gangguan jiwa dan orientasi religiusitas yang melatarbelakangi sikap para pengurus panti terhadap ODGJ. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk melakukan studi korelasional mengenai hubungan antara *public stigma* gangguan jiwa dan orientasi agama pada populasi pengurus panti rehabilitasi sosial. Peneliti memilih populasi pengurus panti rehabilitasi sosial karena mereka adalah individu yang terlibat secara intensif dengan ODGJ setiap harinya. Akan berbahaya apabila mereka memiliki *public stigma* gangguan jiwa yang membuat mereka mendiskriminasi ODGJ secara negatif dalam pelayanan mereka. Selain itu, peneliti merasa bahwa penting untuk

meneliti mengenai *public stigma* oleh karena jenis stigma ini merupakan sumber pencetus terjadinya stigma dalam jenis-jenis lainnya, contohnya *self-stigma* (stigma terhadap diri sendiri; Goffman, 1963).

Pada intinya, penelitian berjudul “Hubungan antara *Public stigma* Gangguan Jiwa dan Orientasi Religiositas pada Pengurus Panti Rehabilitasi Sosial di Jabotabek” ini merupakan studi korelasional berdesain kuantitatif dalam bidang area psikologi sosial. Penentuan topik ini didasari oleh pertimbangan peneliti mengenai adanya sejumlah fenomena terkait sikap dan perilaku para pengurus panti rehabilitasi sosial terhadap ODGJ. Penentuan wilayah Jabotabek didasari dengan pertimbangan peneliti mengenai meningkatnya jumlah ODGJ di Jakarta dan juga ditemukannya kasus-kasus diskriminasi di kota-kota satelit sekitarnya (Ernis, 2017; HRW 2016a; 2016b) Selain itu, nihilnya literatur atau penelitian Indonesia mengenai hubungan antara *public stigma* gangguan jiwa dan orientasi religiositas juga merupakan hal yang peneliti pertimbangkan. Walaupun terdapat penelitian yang dilakukan di mancanegara mengenai topik ini (Martin et al., 2011; Song et al., 2005; Tzouvara & Papadopoulos, 2009), namun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat menjadi penemuan baru dalam bidang ilmu psikologi sosial mengenai variabel yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus diskriminasi dalam perawatan ODGJ di negara ini.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara dimensi *public*

*stigma* gangguan jiwa dan orientasi religiositas pada populasi pengurus panti rehabilitasi sosial di Jabotabek?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui *public stigma* gangguan jiwa yang dimiliki oleh para pengurus panti sosial kesehatan jiwa di Jabotabek.
- 2) Untuk mengetahui orientasi religiositas yang dimiliki oleh para pengurus panti sosial kesehatan jiwa terhadap gangguan jiwa di Jabotabek.
- 3) Untuk menguji hubungan antara *public stigma* gangguan jiwa dan orientasi religiositas yang dimiliki oleh para pengurus panti sosial kesehatan jiwa di Jabotabek

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur bagi ilmu psikologi sosial, khususnya mengenai stigma kesehatan mental dan juga orientasi religiositas. Diharapkan penjelasan dalam penelitian ini juga dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu psikologi klinis atau abnormal yang terkait erat dengan topik yang dibahas

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan penjelasan kepada masyarakat luas (terutama bagi yang memiliki relasi dengan ODGJ) mengenai variabel psikologis yang terkait dengan sikap yang melatarbelakangi bagaimana para pengurus panti rehabilitasi sosial memperlakukan ODGJ yang dirawatnya. Semoga dari penjelasan yang ada, masyarakat dapat memahami bahwa agama berhubungan dengan bagaimana seseorang bersikap terhadap kaum ODGJ.

Diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan yang berguna bagi institusi kesehatan mental, baik yang dimiliki pemerintah ataupun swasta, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh para pengurus dan menurunkan peluang terjadinya diskriminasi. Dengan mengetahui hubungan antara orientasi religiositas dan juga *public stigma* gangguan, maka pihak institusi dapat mempertimbangkan salah satu atau kedua variabel tersebut dalam memilih pekerja yang tugasnya adalah melayani kaum ODGJ (seperti para pengurus panti rehabilitasi sosial). Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu berguna bagi institusi untuk mengembangkan upaya intervensi untuk memberantas *public stigma* gangguan jiwa yang berdampak negatif bagi para ODGJ.

Untuk para partisipan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan *insight* untuk melakukan refleksi bahwa motivasi mereka untuk melibatkan agama dalam kehidupan mereka memiliki hubungan dengan stigma yang mereka miliki terhadap para ODGJ. Lalu, diharapkan mereka dapat berpikir mengenai bagaimana hal tersebut berdampak terhadap tindakan yang mereka lakukan (terutama diskriminasi) dalam mengurus penghuni panti.